

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan masyarakat telah wajar terjadi disparitas dalam pendapatan. Akan tetapi bila sebagian kecil masyarakat menjalani hidup dengan sangat terbatas, berada dibawah sandar kemiskinan, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat menjalani kehidupan yang mewah, hidup dengan serba kecukupan dan harta yang sangat melimpah, maka disitulah letak ketidak wajaran dalam disparitas pendapatan (Syahrin et al., 2022)

Kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua permasalahan besar yang terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Kurniawan, 2018).

Menurut badan pusat statistika (BPS), presentase penduduk miskin di tingkat nasional adalah sebesar 9,57% pada bulan September 2022, yaitu sebesar 0,03% poin lebih tinggi dibandingkan bulan Maret 2022 dan 0,14% poin lebih rendah dibandingkan bulan September 2021. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,16 juta jiwa pada September 2022 (dari 11,82 juta jiwa pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta jiwa pada September 2022). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat sebesar 0,04 juta jiwa pada periode yang sama (dari 14,34 juta jiwa pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta jiwa pada September 2022) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Sementara untuk Kabupaten Ponorogo sendiri mengalami penurunan angka kemiskinan. Menurut badan pusat statistika Kabupaten Ponorogo presentase masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dari 10,26% pada tahun 2021 menjadi 9,32% pada tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan di Ponorogo juga menurun dari angka 1,08 menjadi 0,99. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan ikut turun dari angka 0,18

pada tahun tahun 2021 berubah menjadi 0,16 pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2023).

Jika kita lihat dari data diatas , meskipun telah terjadi penurunan pada angka kemiskinan, akan tetapi belum ditemukannya solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia (Jurnal & Islam, 2019). Sebagaimana Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-nak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara (Hi & Hi, 2019).

Maka pemerintah Indonesia selalu mengupayakan agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan secara bertahap dapat dientaskan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan (Syawie, 2011).

Dalam hal ini, disamping tugas dari pemerintah, dibutuhkan juga keterlibatan warga untuk membantu menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Keterlibatan warga dalam kehidupan sosial sangat diharapkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan bersama. Keterlibatan warga merupakan cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk memperbaiki nasib orang lain atau membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. Keterlibatan warga adalah suatu bentuk keterlibatan yang diterapkan secara sadar guna mencapai hidup yang lebih baik (Loduvikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay, 2020).

Keterlibatan warga adalah kegiatan yang dimaksudkan dilakukan untuk perubahan dalam kehidupan warga negara atau masyarakat yang menyatukan perbedaan aspek seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi untuk membuat perubahan. Langkah ini adalah upaya untuk memperbaiki

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat masyarakat merupakan bagian dari negara dan kehidupan bernegara, maka perlu adanya perkembangan dan peran warga negara dalam membangun keterlibatan sosial dalam lingkungan masyarakat (Sutrisno, Sunarto 2019).

Filantropi merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga yang banyak dipraktikkan di Indonesia. Budaya adat istiadat yang sudah mendarah daging, khususnya di pedesaan, seperti filantropi merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga. Data budaya menunjukkan bahwa praktik amal diterapkan dengan memberikan sedekah kepada sahabat, kerabat, dan tetangga yang kurang mampu. Ciri lainnya ditunjukkan dengan adanya tuntutan masyarakat agar tujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu diutamakan. Pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia, jumlah penduduk miskin meningkat dari 1 menjadi 48% (Bahjatulloh, 2016).

Filantropi merupakan keinginan untuk membantu kepada sesama diwujudkan dalam bentuk uang atau barang yang dapat membantu. Bangsa Barat mendefinisikan filantropi sebagai tindakan kesukarelaan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kesukarelaan merupakan perilaku bebas, dimaksudkan untuk membantu, melayani, dan berteman dengan warga untuk menekan rasa sakit, kekurangan, dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang diberikan seperti dengan meningkatkan pendidikan dan rekreasi mereka (Purwatiningsih & Adinugraha, 2018).

Keterlibatan warga dan filantropi memiliki kaitan yang erat. Filantropi di Indonesia hadir sebagai wujud keterlibatan warga negara sipil dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berlandaskan kecintaan akan kemanusiaan dengan berbagai bentuk bantuan yang sesuai dengan nilai-nilai berbagi yang terstruktur di dalam lingkup masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk nyata keterlibatan warga negara dalam menyelesaikan masalah dalam sektor sosial dan kemanusiaan yaitu dengan hadirnya filantropi di Indonesia (Indriyani et al., 2019).

Komitmen Muhammadiyah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia sudah muncul sejak abad pertama berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang sejak lahir lebih tampil sebagai gerakan amal bahkan gerakan amal/filantropi. Muhammadiyah tidak begitu tertarik dengan polemik keagamaan, melainkan lebih cenderung pada kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama, dan gandrung pada amal (Fauzi et al., 2020).

Muhammadiyah telah mendapatkan reputasi dalam mengelola inisiatif kemanusiaan di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan selama lebih dari satu abad. Trisula Muhammadiyah yang terdiri dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) berdiri ketika organisasi tersebut memasuki abad kedua (Zakat et al., n.d. 2018).

Semangat filantropi Muhammadiyah pada era sekarang tertuang pada terbentuknya Lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah atau yang biasa disingkat dengan LAZISMU. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya (Jurnal & Islam, 2019).

LAZISMU menyalurkan Zakat dan Infaq melalui dua jalur. Jalur pertama adalah melalui kegiatan yang terprogram secara rutin. Dalam rangka penyaluran dana ZIS, LAZISMU melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan : Keluarga Fakir dan Miskin, Beasiswa Sekolah, Panti Asuhan, Bantuan guru dan ustad/ustadzah, Dana Fiisabillah PDM, Dana Kesehatan, dll. Jalur kedua akan dikirimkan sewaktu-waktu atau kapan saja sesuai kebutuhan, seperti musibah, kecelakaan atau bencana alam (Jurnal & Islam, 2019).

LAZISMU melakukan modernisasi dalam pengelolaan dana-dana filantropi, sehingga hasilnya lebih maksimal dalam memberikan manfaat

untuk umat dan bangsa (Fauzi et al., 2020). Untuk melibatkan warga menurut (Rahmadani et al., 2021) LAZISMU memiliki 2 strategi yaitu dengan Direct Fundraising (perhimpunan secara langsung) dan indirect fundraising (perhimpunan secara tidak langsung) serta didukung dengan pemanfaatan media sosial seperti instagram, whatsapp, facebook, youtube, dll.

Merujuk pada penelitian Sulton, (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ditengah derasnya arus nilai-nilai individualistik dan pragmatisme, keterlibatan sipil dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat seperti BS-RTLH masih sangat signifikan. Keterlibatan sipil melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari individu, kelompok warga, organisasi massa keagamaan, sampai Lembaga kemasyarakatan lain seperti perguruan tinggi.

Selain itu penelitian oleh Nuruddin, (2021) mengatakan Bentuk keterlibatan masyarakat meliputi bidang politik, pemerintahan, pendidikan, ilmu pengetahuan & teknologi, kesejahteraan sosial, pertahanan negara, agama, dan sosial budaya. Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat tersebut akan membuka jalan bagi negara-negara yang lebih progresif di masa depan.

Diperkuat pula dengan penelitian Sutrisno, Sunarto, (2019) *civic engagement* yang dikembangkan terintegrasi pada program kuliah kerja nyata tematik (KKN-T). *Civic Engagement* diaktualisasikan dalam bentuk empat tema yakni tema air, tema Pendidikan, tema infrastruktur dan tema energi. Keempat tema ini menjadi isu utama yang dilakukan mahasiswa untuk berpartisipasi pada lingkungan masyarakat guna menyiapkan generasi muda yang memiliki rasa sosial kemanusiaan yang tinggi dalam ber kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan atas dasar nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia.

Berbeda dengan sejumlah penelitian tersebut yang menekankan terutama pada pentingnya keterlibatan warga, dan jenis aktivitas keterlibatan warga. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan warga (*civic engagement*) dari aspek politik, sosial, moral dan sipil dalam Filantropi di LAZISMU Kabupaten Ponorogo. Hal mana dimaksudkan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif bagaimana keterlibatan warga dipraktekkan dalam rangka kesejahteraan bersama melalui Lembaga ZIS.

Penulis merasa penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang motivasi, nilai, dan sikap yang mendorong individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan filantropi.. selain itu dapat membantu mengukur sejauh mana keterlibatan warga telah memberikan manfaat dan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

Penelitian ini juga dapat menghasilkan data dan informasi yang penting untuk memahami tingkat, jenis, dan motivasi keterlibatan warga dalam gerakan filantropi. Data ini dapat memberikan wawasan tentang profil dan karakteristik warga yang terlibat, besaran kontribusi, serta preferensi dan kebutuhan mereka dalam berpartisipasi. Informasi ini berguna dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan warga dalam Gerakan filantropi yang diorganisasikan LAZISMU Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan keterlibatan warga khususnya filantropi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan warga dalam gerakan filantropi yang diorganisasikan LAZISMU Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan keterlibatan warga khususnya dalam filantropi.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah sumber informasi terkait dengan pentingnya keterlibatan warga dalam budaya tolong menolong antar sesama manusia.
  - b. Bagi Lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam staretegi untuk meningkatkan keterlibatan warga, khususnya dalam ZIS
  - c. Bagi mahasiswa menambah wawasan dan pengalaman peneliti, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengelolaan sebuah Lembaga LAZIS terutama pada LAZISMU.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana sesungguhnya keterlibatan warga khususnya warga Ponorogo dalam budaya tolong menolong dan berbagi agar dapat dijadikan motivasi atau contoh warga lain untuk selalu berbagi sebagian rizqinya kepada warga yang kurang mampu